

# IMPLEMENTATION OF KAMPUNG KB IN INCREASING COMMUNITY SELF-HELP AT KAMPUNG KB

**Ilva Maidia Wita<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia

<sup>2</sup>ilvamaidia15@gmail.com

## ABSTRACT

The slow decline in fertility rates (TFR) and the weakening of the implementation of the program for Population, Family Planning and Family Development (KKBPK) at the level of the field lines at the moment, so it will need a strategic innovation program to strengthen KKBPK 2015-2019 program that has leverage the efforts to achieve the target / targets as well as expand the scope of the cultivation program at all levels KKBPK West Java Province through the family planning construct program. Family planning construct in design as a community empowerment efforts of the management of family planning programs. Its activities are managed based on the principle of, by, and for the community itself, as an end of course the development of society itself. The government only stimulate and mentoring, the rest is the responsibility of society. With the approach of qualitative research study conducted by applying the stages of operational research in order to evaluate the success of the intervention program in family planning construct at Nagrak, Sukabumi regency. The purpose of this study to improve the achievement KKBPK program and other related programs to mewujudkan quality small family. The research results are the success of the family planning construct is largely determined by the active role of the family or the community in various levels, to the need for intervention programs, funds, facilities, infrastructure, IEC, advocacy, mobilization and facilitation of SKPDKB and across sectors with the final target culture movement collectively and sustainable, the village family planning can be considered as a public initiative is not just a government program. Regent crucial role together Working Group Family planning construct Regency / City by involving members of parliament sit with an agenda intervention program in the family planning construct as well as to maintain the continuity of the program. Necessary assistance in the implementation of the program KKBPK field line and training "Skill" in the group UPPKS and other farmer groups as well as the provision of budget funds in support of advocacy, IEC and mobilization in the region of the family planning construct.

**Keywords:** Family Panning Construct, Quality Small Family, Non-Governmental

## PENDAHULUAN

Penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan yang seutuhnya merupakan motivasi utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membenahi dan mendukung program Keluarga Berencana yang secara menyeluruh mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat adil dan makmur di provinsi Jawa Barat. Dalam rangka penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), salah satu program yang digagas dan dibentuk adalah Kampung KB yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Januari 2016 (BKKBN, 2016), yang kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Gubernur Jawa Barat (2016) Nomor: 843.4/20/Yan Bangsos Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota Se Jawa Barat, dan Surat Edaran Bupati Sukabumi (2016) Nomor: 465/2045/DPPKB Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kecamatan Se Kabupaten Sukabumi.

Kampung KB merupakan salah satu program KKBPK dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (BKKBN, 2016, 2017; Cheerli & Susanti, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017; Mardiyono, 2017; Meiliyani, Amin, & Kondorura, 2019; Sugiyono, 2016; Zuhriyah, Indarjo, & Raharjo, 2017). Pada tahun 2011 Kabupaten Sukabumi telah terlebih dahulu membentuk Kampung Keluarga Kecil Berkualitas (Kampung KKB). Hingga tahun 2015 telah terbentuk Kampung KKB sebanyak 130 Kampung dari 26 Kecamatan. Pada Tahun 2017 ini dengan telah dicanangkannya Kampung KB secara nasional serta program pembentukan Kampung KB dari BKKBN Provinsi Jawa Barat maka dibentuklah Kampung KB yang nantinya akan dibentuk di 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi (Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2017). Kampung KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK). Kampung KB merupakan salah satu upaya menjadikan program KKB-PK sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian terhadap fenomena tertentu yang diperoleh dari subyek berupa kelompok atau perspektif lain. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa “*a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Adapun fokus penelitian ini adalah desain kampung KB, program kampung KB, komponen kampung KB, implementasi kampung KB, dan evaluasi kampung KB. Cara pengumpulan data: Wawancara mendalam dengan instrumen pedoman wawancara dengan semua yang terkait dengan kampung KB.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Identifikasi

Sumber Rujukan dan Implementasi Kebijakan untuk pengembangan kampung KB di BKKBN Pusat adalah merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2016) No.440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia; Surat Kepala BKKBN (2016) Pusat No. 046/BL/200/B4/2016 Tanggal 12 Januari 2016, Perihal Siaran Langsung Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia. Tepatnya Kampung KB Tahun 2017 di Kota Sukabumi, yakni di 7 wilayah RW di 7 wilayah Kecamatan se Kota Sukabumi, sudah dicanangkan secara resmi oleh Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., tepatnya tanggal 26 Oktober 2017, di Ruang Pertemuan Hotel Taman Sari Kota Sukabumi. Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M., para pejabat dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Propinsi Jawa Barat, para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), para Camat dan Lurah, serta para tamu undangan lainnya. Dalam rangka penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) 2015-2019, diharapkan BKKBN untuk dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran. Untuk secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam hal ini BKKBN membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program KKBP dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait

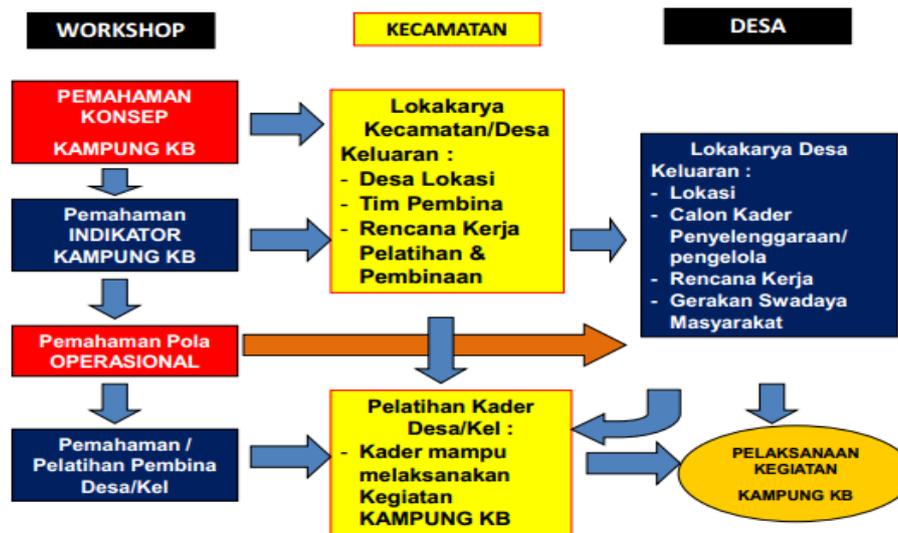
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah (Rw/Rt). Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (BKKBN, 2016, 2017; Cheerli & Susanti, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017; Mardiyono, 2017; Meiliyani et al., 2019; Sugiyono, 2016; Zuhriyah et al., 2017). Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2016, 2017).

Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria utama yaitu wilayah yang memiliki jumlah Pra KS dan KS-1 (miskin) diatas rata-rata tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada, dan jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi. Setelah terpenuhi kriteria utama tersebut diatas, selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria berikut ; kumuh, pesisir/nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), Bantaran Kereta Api, kawasan miskin (daerah kota), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, dan daerah padat penduduk. Tujuan terbentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas (BKKBN, 2017; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017; Zuhriyah et al., 2017). Partisipasi semua pemangku kepentingan dan masyarakat mutlak diperlukan dalam pembentukan Kampung KB. Termasuk, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Partisipasi juga akan sangat membantu kesuksesan program tersebut. Hal terpenting dari pencaanaan Kampung KB adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Antara lain dengan sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program KB kepada masyarakat, serta pelayanan KB di tingkat desa (Mardiyono, 2017; Meiliyani et al., 2019).

### Program Kampung KB



## Implementasi Kampung KB



## Analisis SWOT

Setelah diidentifikasi dan dilihat dari sisi intervensi yang telah dilakukan Perwakilan BKKBN Jawa Barat maupun SKPD KB Kabupaten, maka kita akan menganalisis SWOT apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengembangan kampung KB. Adapun yang menjadi Strength (kekuatan) untuk mengembangkan kampung KB Di Kecamatan Nagrak Sukabumi adalah adanya PLKB di Kampung KB tersebut, karena tanpa dukungan dari PLKB mustahil untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK dan program terkait di wilayah kampung KB. Kemudian tersedianya dukungan dana (APBN & APBD) untuk wilayah kampung KB, karena tanpa dukungan dana kegiatan kampung KB tidak akan berjalan sesuai harapan. Juga adanya Pengelola Kampung KB yang diterbitkan melalui SK Bupati. Sedangkan yang menjadi Weaknesses (kelemahan) adalah jumlah PLKB sangat terbatas, juga di wilayah kampung KB itu sulit mencari kader karena SDM sangat rendah sekali, serta keterbatasan sarana, prasarana dan dana operasional di wilayah tersebut.

Apabila dilihat dari Opportunities (peluang) di wilayah kampung KB tersebut adalah adanya dukungan politis dari Bupati Kabupaten Sukabumi, dibuktikan dengan pencanangan “Kampung KB” tersebut oleh Bupati sendiri. Kemudian dukungan seluruh instansi Dinas dan lintas sektoral untuk intervensi wilayah kampung KB serta dukungan pers terhadap kampung KB, sehingga seluruh kegiatan di kampung KB masyarakat semua mengetahui. Jika dianalisis dari sisi Threat (tantangan) maka dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah kampung KB sebagian besar warganya kurang mampu, SDM rendah, budaya kawin muda dan lemahnya advokasi pengelola program kepada pemerintah daerah. Sedangkan apabila dianalisis dari kebijakan bahwa kampung KB ini sangat strategis, karena didukung oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, bahkan sampai di tingkat desa, RT, RW dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakatpun sangat antusias menyambutnya. Ada 5 (lima) yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan program KKBPK dan program lainnya di kampung KB diantaranya (a). Komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan disemua tingkatan (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan). (b). Integritas program KKBPK dan integritas lintas sektor. (c). Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra/stakeholder. (d). Semangat dan dedikasi para pengelola program KKBPK di lini lapangan (PKB, IMP) (e). Partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:  
1) Kebijakan pemerintah pusat terkait tentang kampung KB yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016, dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Jawa Barat

Nomor : 843.4/20/Yan Bangsos Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten /Kota Se Jawa Barat, dan surat edaran Bupati Sukabumi nomor 465/2045/DPPKB Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kecamatan Se Kabupaten Sukabumi; 2) Potensi untuk melakukan intervensi di kampung KB baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa untuk anggaran tahun 2016 tidak ada, namun akan dianggarkan tahun 2017 dan seluruh aparat siap mensukseskan kampung KB asalkan penggerakannya dari SKPD KB; 3) Penilaian Indikator keberhasilan input: jumlah PLKB/PKB masih belum proporsional, namun setelah adanya kampung KB ini seluruh PLKB/PKB bahu membahu untuk mensukseskan program KKBPK di wilayah tersebut dan dibantu kader yang begitu antusias untuk mensakseskannya, Anggaran Dana Desa (ADD) khusus untuk program KKBPK belum teranggarkan; 4) Penilaian indikator keberhasilan proses: terdapat peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi KIE dan penggerakan, dulu PKB/PLKB jarang berkunjung di wilayah kampung KB setelah wilayahnya terpilih menjadi kampung KB menjadi sering berkunjung, juga membentuk kelompok kegiatan baru walaupun pertemuan masih belum ada sambil jalan diusahakan secara berkala, serta pelayanan posyandu untuk meningkatkan pelayanan KB; 5) Penilaian indikator keberhasilan Out put: ada perubahan baik peserta KB Baru terutama KB Nagrak, pertemuan kelompok kegiatan yang telah dibentuk belum melakukan kegiatan secara berkala; 6) Keberhasilan program KKBPK dan program terkait lainnya di wilayah kampung KB sangat ditentukan pula oleh peran aktif masyarakat itu sendiri dari berbagai tingkatan dan perlu KIE sebagai target akhir yaitu gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap prakarsa publik bukan semata program pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN

- BKKBN. (2016). Menilik Keberadaan Kampung KB. *Jurnal Keluarga, 1*, 7–10. Retrieved from [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/SUPLEMEN-resize-new\\_final\\_Oke.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/SUPLEMEN-resize-new_final_Oke.pdf)
- BKKBN. (2017). *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)*. Jakarta: BKKBN.
- Bupati Sukabumi. Surat Edaran Bupati Sukabumi Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kecamatan Se Kabupaten Sukabumi (2016). Indonesia: Surat Edaran.
- Cheerli, & Susanti, I. C. (2018). *Kampung KB: Upaya Nyata Membangun Bangsa*. Jakarta: Yayasan Cipta Cara Padu. Retrieved from <https://www.yccp-indonesia.org/wp-content/uploads/2018/03/Full-Buku-Kampung-KB-Cover-dan-Isi.pdf>
- Gubernur Jawa Barat. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor Tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota Se Jawa Barat (2016). Indonesia: Surat Edaran.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat. Retrieved December 13, 2018, from <http://www.depkes.go.id/pdf.php?id=17060600002>
- Kepala BKKBN. Surat Kepala BKKBN Perihal Siaran Langsung Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia (2016). Indonesia.
- Mardiyono, M. (2017). Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Cakrawala, 11*(2), 129–136. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.13>
- Meiliyani, M., Amin, M. J., & Kondorura, D. (2019). Studi Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *EJournal Pemerintahan Integratif, 7*(2), 143–152. Retrieved from [http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/01/pin\\_meiliyani\\_\(01-30-19-02-07-49\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/01/pin_meiliyani_(01-30-19-02-07-49).pdf)
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Edaran Mendagri Perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB seluruh Indonesia (2016). Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2017). Kampung KKB (Kampung Keluarga Kecil Berkualitas). Retrieved December 13, 2018, from <https://sukabumikab.go.id/portal/berita-opd/706/kampung-kkb-kampung-keluarga-kecil-berkualitas.html>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). Kampung KB Salam “Dua Anak Cukup.” *Jurnal Keluarga*, 1, 3. Retrieved from [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/SUPLEMEN-resize-new\\_final\\_Oke.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/SUPLEMEN-resize-new_final_Oke.pdf)
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Raharjo, B. B. (2017). Kampung Keluarga Berencana dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana. *HIGEIA: Journal of Public Health Research and Development*, 1(4), 1–13. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/15195>